

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia pariwisata Indonesia memang selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya menarik para wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal ini terjadi disebabkan atas situasi dan kondisi keamanan juga politik yang berpengaruh kedalam perkembangan pariwisata. Terlebih pada saat terjadinya peristiwa teror bom di Bali yang menewaskan ratusan orang yang juga sempat memporak porandakan dunia pariwisata Bali yang merupakan sumber utama dari pariwisata Indonesia. Dengan hal tersebut, hampir seluruh dari wilayah pariwisata Indonesia juga terkena dampaknya. Dengan keadaan tersebut maka pendapatan yang diperoleh setiap daerah di Indonesia pun cenderung akan mengalami penurunan yang disebabkan atas berkurangnya pendapatan dari salah satu sektor jasa pariwisata. Sampai pada pemberlakuan otonomi daerah yang diputuskan oleh pemerintah pusat dimana pemerintah daerah diberi kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola daerah yang dipimpinnya dengan tujuan agar setiap daerah mampu mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya termasuk melalui sektor pariwisata.

Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah secara serentak pada tanggal 1 januari 2001 telah membawa perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang yang dimaksud ialah: UU No. 22

Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Negara; UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut merupakan penegas tentang sistem pemerintahan desentralisasi seperti yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18 “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Inti dari undang-undang otonomi tersebut ialah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).

Melalui otonomi daerah kewenangan pemerintah pusat dalam beberapa bidang didelegasikan menjadi kewenangan daerah dimana di dalamnya sudah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengelola dan mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Hakekat pemberian otonomi pada dasarnya bertujuan lebih menjamin terjadinya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun

hubungan antar pemerintah daerah, yang pada gilirannya pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah menjadi suatu kekuatan ekonomi dalam skala regional. Namun demikian, proses otonomi daerah dalam kerangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut di atas, sebagian lebih disikapi oleh semangat berlebihan para birokrat dan tokoh di daerah untuk memperoleh “kemerdekaan” (kebebasan) dalam mengelola kewenangan-kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pendekatan rasional malah sering diabaikan, misalnya apakah potensi sumber daya ekonomi dan struktur kelembagaan yang ada saat ini sudah mampu dan siap menjamin kemandirian daerah.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus dibarengi oleh semangat kewiraswastaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Padahal untuk mewiraswastakan, pemerintah mensyaratkan secara mutlak kehadiran *good and clean governance*. Untuk itu, pertama-tama harus ada mekanisme perubahan mental dalam kinerja pejabat publik untuk memacu pemerintah dalam demi mewujudkan misi otonomi, yaitu aktif, kreatif dan inovatif.

Banyak daerah menyikapi otonomi daerah dengan menggali sumber-sumber asli penerimaan asli daerah (PAD), untuk maksud memperkuat APBD-nya. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sebaiknya yang lebih perlu ditekankan ialah prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan

keanekaragaman daerah. Peningkatan PAD melalui peningkatan presentase pajak dan retribusi misalnya, akan berpotensi menambah beban masyarakat terutama masyarakat miskin. Di lain pihak, pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya alam secara berlebihan dapat membahayakan daya dukung alam dan lingkungan.

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan APBD yang relatif cukup besar dibandingkan dengan provinsi lainnya tentunya juga menginginkan proses otonomi yang berlangsung sehat menuju *good and clean governance*. Berbagai kajian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa provinsi ini termasuk salah satu provinsi yang siap menyelenggarakan otonomi, antara lain ditunjukkan oleh PAD terhadap total APBD yang relatif cukup tinggi dibandingkan provinsi lain (untuk tahun anggaran 2000 mencapai 48,11 persen). Namun demikian, provinsi Jawa Barat memerlukan dukungan infrastruktur termasuk fasilitas sosial dan ekonomi yang memadai, agar masyarakat dapat melakukan berbagai aktifitasnya secara mudah. Disamping itu, diperlukan juga peningkatan kinerja pemerintahan daerah, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pelayanan publik. Hal ini merupakan tuntutan logis masyarakat sebagai kompensasi dari kewajibannya membayar berbagai pajak dan retribusi daerah.

Berikut ini disajikan kontribusi Pajak Sub. Sektor Kuliner terhadap total PAD Sektor Pariwisata daerah di provinsi Jawa Barat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pajak Sub. Sektor Kuliner Terhadap PAD Sektor Pariwisata
Tahun 2001-2008
(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran	Realisasi PAD sektor pariwisata	Persentase(%)
2001	67.138.943.517	96.351.476.921	69,7
2002	87.359.256.792	107.127.832.919	81,5
2003	30.999.603.329	142.508.410.581	21,8
2004	34.687.514.636	151.392.855.760	22,9
2005	121.277.137.157	189.565.024.201	64
2006	178.170.269.040	255.255.153.212	69,8
2007	221.027.790.857	280.176.995.342	78,9
2008	238.287.285.590	344.552.621.323	69,2

Sumber : Disparbud Jawa Barat tahun 2001-2008

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak sub. Sektor kuliner terhadap PAD Sektor Parirwisata terus mengalami Fluktuasi sejak tahun 2001 sampai dengan 2008. Dari hasil penelitian yang didapat disebabkan karena kurang efektifnya pemungutan yang dilakukan dan situasi perekonomian Indonesia yang kurang stabil.

Berikut ini disajikan pula target beserta realisasi penerimaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap total penerimaan asli daerah di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2001 sampai dengan 2008, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Persentase (%)
2001	1.093.880.000.000	421.442.528.594	38,5%
2002	1.091.756.000.000	874.126.943.201	80,0%
2003	1.565.000.000.000	1.859.958.699.415	118,8%
2004	2.150.000.000.000	2.688.348.395.804	125,0%
2005	2.869.576.000.000	3.416.077.781.931	119,0%
2006	3.226.532.497.766	2.501.074.366.198	77,5%
2007	3.425.187.030.000	2.886.994.175.689	84,2%
2008	3.796.638.400.000	3.728.909.574.242	98,2%

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Sampai 2008

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah realisasi pajak yang diperoleh mengalami kenaikan yang cukup besar dan kemudian mengalami jumlah penurunan yang tidak sedikit pula, yang terjadi dari tahun 2005 menuju tahun 2006. Dari hasil penelitian, hal ini disebabkan karena pemungutan pajak yang kurang efektif dan efisien dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.3
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Total Pajak Daerah	Total PAD	Persentase (%)
2001	421.442.528.594	451.597.140.863	93,3%
2002	874.126.943.201	960.954.123.850	90,9%
2003	1.859.958.699.415	2.009.915.792.381	92,5%
2004	2.688.348.395.804	2.943.676.194.388	91,3%
2005	3.416.077.781.931	3.600.967.396.595	94,8%
2006	2.501.074.366.198	3.518.202.284.652	74,6%
2007	2.886.994.175.689	3.165.301.869.383	91,2%
2008	3.728.909.574.242	4.024.853.399.550	92,6%

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Sampai 2008

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 secara umum telah melebihi target, hanya pada tahun 2006 realisasi kurang dari target. Walaupun secara umum penerimaan pajak daerah telah melebihi target, namun bukan berarti kinerja dalam hal pengelolaan pajak daerah telah berjalan baik.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerimaan pajak dari sub. Sektor kuliner yang didapat melalui sektor pariwisata. Adapun cakupan dalam sub. Sektor kuliner ini adalah melalui pajak hotel dan restoran. Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sub.sektor kuliner adalah hal-hal yang berkaitan dengan pajak pendapatan dari hotel dan restoran yang didalam operasionalnya terdapat suatu restoran yang merupakan salah satu sumber bagian dari pendapatan hotel. Hal ini dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti.

Upaya untuk memperbesar PAD harus dilakukan secara hati-hati melalui kajian yang mendalam, untuk menghindari beban masyarakat yang semakin besar akibat bertambahnya pajak dan retribusi yang harus dibayar, serta harus berdasarkan pad azas keadilan terutama bagi masyarakat miskin. Kebijakan PAD harus memepertimbangkan seberapa besar potensi penerimaan daerah yang dimiliki dan belum digali, jenis-jenis PAD-nya, target group (objek pajak) serta mekanisme penarikannya. Karena begitu pentingnya PAD bagi arah perkembangan APBD Jawa Barat pada tahun-tahun yang akan datang.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, mengandung pemikiran yang lebih progresif dalam kemandirian daerah pada provinsi, kota/kabupaten dan masyarakat, serta lebih mengarah pada “steering, assisting, fasilitator dan mitra” yang menuntut perubahan sikap (attitude) dari seluruh komponen masyarakat untuk lebih kreatif dan mandiri. Pada sisi lain, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dituntut lebih berkualitas dalam menghadapi era perubahan yang dinamis dan berkembang. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom disadari atau tidak, membawa perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama penanganan yang berkaitan dengan masalah pariwisata di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pendapatan pajak daerah
2. Pendapatan retribusi daerah
3. Pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Periode tahun 2003-2008 merupakan masa yang penuh tantangan bagi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Tantangan yang dihadapi terutama dalam aspek pemerintahan, ekonomi dan politik serta aspek-aspek sosial dan budaya. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2003-

2008 cenderung masih berada dalam tahap transisi, untuk mewujudkan reformasi di segala bidang. Pada pemerintahan daerah, masa transisi tersebut ditandai dengan belum mantapnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Terbitnya Intruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata untuk lingkup Nasional dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat dalam lingkup regional, tentunya hal ini akan mempengaruhi terhadap upaya akselerasi pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata di Jawa Barat pada saat ini dan yang akan datang.

Ada beberapa amanat penting yang perlu dilaksanakan, sesuai dengan yang tertuang dalam Intruksi Presiden RI Nomor 16 Tahun 2005 dimaksud, oleh semua pihak yang berkompeten dalam pengembangan dalam pengembangan bidang pariwisata nasional dan di Jawa Barat khususnya, untuk secara terus menerus berupaya dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya Indonesia.

2. Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
3. Secara produktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
4. Menggunakan tema “Indonesia Ultimate in Diversity” dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema “Kenali negerimu Cintai Negerimu Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara” dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri.

Selain harus mengambil langkah-langkah strategis kepada para Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Non Departemen terkait lainnya, khusus kepada Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata, para Gubernur, Bupati dan Walikota, diinstruksikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata :

- a. Menyiapkan informasi yang lengkap di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan kerjasama internasional dalam rangka menunjang promosi pariwisata Indonesia;
- c. Mendorong pengembangan destinasi pariwisata unggulan;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan daya tarik wisata.

2. *Para Gubernur, Bupati dan Walikota :*

- a. Meningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah;
- b. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan sumber daya manusia);
- c. Mengadakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- d. Mengembangkan informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. Meningkatkan pelaksanaan sadra wisata melalui program sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan);
- f. Meningkatkan dan memberikan kemudahan perizinan industri kebudayaan dan pariwisata, serta kemudahan perizinan pemanfaatan lokasi untuk syuting film;
- g. Melakukan penataan obyek wisata dan menyiapkan infrastruktur dasar;
- h. Mengembangkan daya tarik wisata di jalur pergerakan wisatawan nusantara dan di sekitar perkotaan;
- i. Melestarikan, tradisi, nilai dan adat istiadat melalui penyelenggaraan “event” daerah.

Dibidang politik, Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2004 mengalami perubahan sistem untuk memilih kepemimpinan nasional yang baru, serta dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sangat mempengaruhi iklim politik di Jawa Barat. Berdasarkan kondisi diatas,

pemerintah dan masyarakat Jawa Barat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif. Selain itu, dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat diperlukan upaya peningkatan kualitas daya saing.

Penduduk Jawa Barat dengan jumlah sekitar 41 juta jiwa merupakan potensi wisatawan nusantara yang besar di masa yang akan datang. Hal tersebut dilihat dari kecenderungan perubahan masyarakat sejalan dengan kemajuan ekonomi, disegala bidang dan bertambah baiknya kondisi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut berpengaruh positif terhadap pariwisata paling tidak karena dua hal, yaitu : pertama, modernisasi berarti akan membawa perubahan psikologis bagi masyarakat. Kedua, modernisasi tentu akan mempengaruhi kegiatan masyarakat. Bilamana kedua indikator tersebut akan membawa pengaruh terhadap minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di dalam negeri.

Indikator keberhasilan pengembangan pariwisata satu daerah seringkali diukur dari keberhasilan dalam meningkatkan wisatawan. Disamping itu indikator lainnya adalah berkaitan dengan peningkatan daerah dari sektor pariwisata. Kedua indikator tersebut merupakan upaya dalam rangka optimalisasi keberhasilan dibidang kepariwisataan yang saat ini menjadi tumpuan daerah sebagai pemicu pengembangan ekonomi daerah. Namun dari sisi indikator produk wisata yang keberadaannya baik pendapatan maupun kunjungan wisatawan kurang mendapat perhatian yang seksama dari para pelaku pariwisata di Kabupaten atau Kota di Jawa Barat, hal tersebut

berimplikasi terhadap menurunnya daya saing produk pariwisata daerah pada pasar pariwisata nasional maupun internasional dan berpengaruh kepada kinerja pengembangan pariwisata daerah tentu berakibat kepada kurangnya usaha pariwisata dalam menunjang pembangunan kepariwisataan di daerah.

Wilayah Provinsi Jawa Barat atau Tatar Sunda, dikenal karena memiliki kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata yang tinggi, meliputi : wisata alam, wisata budaya dan wisata sumber daya. Kegiatan pariwisata telah diandalkan sebagai sektor yang potensial untuk pembangunan Jawa Barat, karena alasan ekonomi, sosial, konservasi dan pelstarian lingkungan dan budaya.

Bagi wisatawan, baik aktual maupun potensial, citra destinasi sangat terkait dengan sumber pembentukan citra itu sendiri. Dalam ptorses pembentukan citra itu sendiri. Dalam proses pembentukan citra secara prinsipil dapat timbul sumber citra Daerah Tujuan Wisata bagi Wisatawan, yaitu :

1. Adanya ***Organic Image Source***, yang dapat diartika sebagai sumber pembentukan citra umum, artinya bahwa wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata bersumber kepada pengalaman pribadi, pendapat kawan, relasi atau saudara (*word of mouth reports*), pendidikan atau media masa, serta berbagai medium informasi lainnya. Citra ini terbentuk dari sumber yang tidak dikontrol, karena berada diluar pengaruh para perencana kepariwisataan disuatu daerah tujuan wisata.
2. Adanya ***Induced Image Source***, yang bertujuan untuk memperkenalkan serta membentuk citra yang sesuai dengan harapan wisatawan. Bentuk-

bentuk umum dari sumber pembetulan citra ini adalah berbagai pesan, tema, kegiatan, festival, fenomena alam, benda-benda buatan alam, serta kejadian-kejadian yang sengaja dirancang untuk dapat ditangkap secara langsung menjadi citra kepariwisataan suatu destinasi. Semua hal tersebut dapat dibentuk di Jawa Barat sebagai sumber untuk memperoleh devisa melalui kunjungan wisatawan ke Jawa Barat dan hal tersebut tergantung pada strategi perencanaan pimpinan dalam menyikapi kepariwisataan Jawa Barat.

Sejalan dengan itu, sektor pariwisata merupakan salah satu primadona sebagai penghasil devisa., karena kegiatan ini memiliki sifat multifier effect (efek ganda), yaitu dapat menumbuhkan perekonomian daerah dan nasional melalui penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara, memperluas dan memeratakan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, memperkaya dan memantapkan budaya jati diri bangsa, memupuk rasa cinta tanah air dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Selain itu, pariwisata memiliki total product yang dikonsumsi oleh wisatawan, berupa product yang dikonsumsi oleh wisatawan, berupa produk yang terlihat (tangible) maupun tidak terlihat (intangible). Komponen product tangible memiliki skala yang besar melibatkan aspek transportasi, industri dan perdagangan besar, retail, pertanian, amenitas, dll. Sementara itu, product intangible melibatkan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, dan kenangan yang merupakan **“Total Product”**.

Seiring dengan visi Jawa Barat sebagai provinsi termaju, maka upaya peningkatan daya saing daerah menjadi faktor penting bagi pemulihan kondisi perekonomian Jawa Barat mendatang. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan perlu lebih ditingkatkan, dengan bertitik tolak dari kondisi tersebut tersebut, prioritas pengembangan struktur perekonomian daerah adalah menumbuhkembangkan daya saing agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya. Upaya menembus pasar dan memenangkan persaingan harus menjadi gerakan bersama dan tekanannya bukan hanya dari sisi produksi, akan tetapi seluruh sistem pemasaran dan perbankan, khususnya dalam mengembangkan 6(enam) bisnis unggulan ”**CORE BUSSINESS**” Jawa Barat, yaitu :

1. Agri bisnis
2. Industri manufacture
3. Jasa Pariwisata
4. Kelautan
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Upaya mensinergikan visi Jawa Barat melalui pengembangan 6 (enam) bisnis unggulan “Core Bussiness” yang salah satunya adalah “Pariwisata”, sektor pariwisata merupakan primadona sebagai penghasil devisa bagi negara dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan data dan kajian diatas bahwa sektor Pariwisata merupakan penyumbang besar dan sangat berpotensi memberikan devisa dalam

pendapatan asli daerah, yang didalamnya termasuk melalui kuliner dalam cakupan pajak hotel dan restoran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, judul yang diambil adalah :

“Pengaruh Sektor Pariwisata Dalam Sub. Sektor Kuliner Terhadap Pendapatan Asli Provinsi Jawa Barat”

1.2 Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa hal yang perlu di identifikasikan sebagai pokok uraian pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan, diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan sub. Sektor kuliner yang masuk melalui pajak hotel dan restoran terhadap sektor pariwisata?
3. Bagaimana pengaruh pajak hotel dan restoran di provinsi Jawa Barat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh sektor pariwisata dalam sub. Sektor kuliner yang termasuk pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah melakukan perbandingan antara data-data otentik dan praktek yang sebenarnya dalam menjawab masalah yang telah diidentifikasi :

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan sub. Sektor kuliner yang masuk melalui pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat?
2. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat?
3. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan sub. Sektor kuliner terhadap PAD Sektor Pariwisata?

1.4 Kegunaan Penelitian

1. *Aspek Teoritis*

Sebagai bahan masukan dan kajian serta referensi dalam penelitian yang sama.

2. *Aspek Praktis*

Dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pengembangan berbagai kebijakan industri pariwisata juga kuliner dalam hal meningkatkan pendapatan sektor pariwisata dan kuliner di Provinsi Jawa Barat.